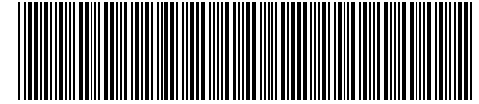




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.400343/2025**



DS:8009-1136-3438-9669

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
- Sebesar : Rp. 292.110.000 (DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA SERATUS SEPULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang
Rp. 292.110.000
Rp. 292.110.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 292.110.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN YOGYAKARTA (030) Rp. 292.110.000

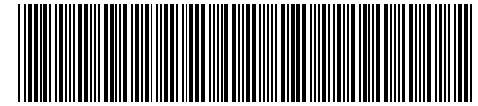
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			292.110.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			292.110.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		2. 01	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.AEA	Koordinasi	7,00	kegiatan	110.000.000
Rincian Output	:	01 AEA.001	Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	6,00	kegiatan	85.000.000
		02 AEA.003	Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum	1,00	kegiatan	25.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	38,00	orang	94.550.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Bimbingan Teknis Percepatan Penyelesaian Perkara	38,00	orang	94.550.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	141,00	Perkara, Berkas Perkara	87.560.000
Rincian Output	:	01 BCA.U01	Perkara Pidana Yang Diselesaikan di Tingkat Banding di wilayah Barat	126,00	Perkara	75.060.000
		02 BCA.U02	Perkara Pidana Korupsi yang Diselesaikan Ditingkat Banding di wilayah Barat	15,00	Perkara	12.500.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
 Kode>Nama Satker : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Halaman : I B. 1

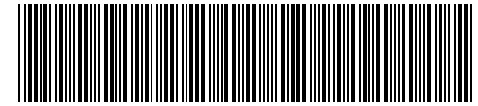
					Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	292.110.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	292.110.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
Kewenangan : (KD)

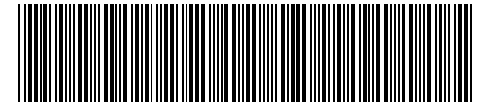
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA	-	292.110	-	-	-	292.110		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	292.110	-	-	-	292.110		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	292.110	-	-	-	292.110		
1049.AEA	Koordinasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	110.000	-	-	-	110.000	04 . 51	
01	RM	-	110.000	-	-	-	110.000	030@	
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	94.550	-	-	-	94.550	04 . 51	
01	RM	-	94.550	-	-	-	94.550	030@	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (04.51 DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA)	-	87.560	-	-	-	87.560	04 . 51	
01	RM	-	87.560	-	-	-	87.560	030	
JUMLAH		-	292.110	-	-	-	292.110		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (04) DI YOGYAKARTA
Kode>Nama Satker : (400343) PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.525	6.041	13.523	11.410	28.151	97.003	5.283	6.505	52.231	19.642	23.871	22.926	292.110
		BELANJA BARANG	5.525	6.041	13.523	11.410	28.151	97.003	5.283	6.505	52.231	19.642	23.871	22.926	292.110
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	5.525	6.041	13.523	11.410	28.151	97.003	5.283	6.505	52.231	19.642	23.871	22.926	292.110
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	5.525	6.041	13.523	11.410	28.151	97.003	5.283	6.505	52.231	19.642	23.871	22.926	292.110
		PERKIRAAN PENERIMAAN	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	261	3.110
		- PNB (425239)	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	259	261	3.110

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400343] PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

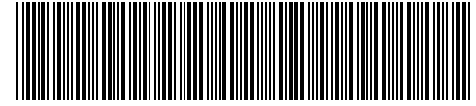
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN
400343	PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA			
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan	Rp. 76.220		
	52 Belanja Barang	Rp. 76.220		
005.03.BF 1049	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
1049.AEA	Koordinasi			
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 19.660		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 2.280		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 12.000		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			
1049.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi			
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			
	Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 42.280		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 005.03.2.400343/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8009-1136-3438-9669

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [04] DI YOGYAKARTA
Kode dan Nama Satker : [400343] PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002